



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
INSPEKTORAT

Jalan Tjilik Riwut No. 98 Km. 5,5 Telepon/Fax (0536) 3231463
PALANGKA RAYA 73112

Nomor : 700/74/LHE-AKIP/INSP/VI.b/2024
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Badan Pengelola dan
Keuangan Aset Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2024

Palangka Raya, 19 Juni 2024
Yth. Kepala Badan Pengelola dan
Keuangan Aset Daerah Kota
Palangka Raya
di -
Palangka Raya.

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah Kota Palangka Raya dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah Kota Palangka Raya. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk memperoleh informasi tentang tingkat akuntabilitas kinerja pada Perangkat Daerah (Unit Kerja) di lingkup Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya, serta menilai tingkat Akuntabilitas Kinerja pada Perangkat Daerah (unit kerja) yang selanjutnya memberikan saran perbaikan serta mendorong Perangkat Daerah dalam peningkatan akuntabilitas kerjanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government), serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Berdasarkan pada kebutuhan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, pelaksanaan evaluasi AKIP dilakukan melalui dua tahapan yaitu yang pertama adalah tahapan persiapan evaluasi atau yang bisa disebut dengan Pra Evaluasi dan Pelaksanaan Evaluasi itu sendiri.

Pra Evaluasi dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kota Palangka Raya Nomor: 700/24/SPT-REV/INSP/II.b/2024





Koordinasi	WPJ	Dalnis	KT	AT
Paraf				

tanggal 27 Februari 2024, pelaksanaan kegiatan Pra Evaluasi dimulai tanggal 27 Februari sampai dengan 1 Maret 2024. Pelaksanaan kegiatan Evaluasi berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kota Palangka Raya Nomor: 700/26/SPT-EV/INSP/III.b/2024 tanggal 4 Maret 2024 mulai tanggal 4 Maret sampai dengan 19 Maret 2024.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh oleh Tim Evaluasi AKIP Perangkat Daerah tahun 2023, bahwa Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah Kota Palangka Raya telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan pemantauan rencana aksi setiap periode triwulan atas capaian kinerja, dalam rangka pengendalian kinerja, dan memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan pada setiap periode (triwulan).
- b. Telah menyusun secara formal Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Palangka Raya.
- c. Telah melakukan pengukuran kinerja dan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja, secara berkala dan berjenjang pada setiap level bagian.
- d. Telah menyusun secara formal Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, namun masih belum memuat definisi operasional yang jelas atas kinerja yang di ukur.
- e. Telah menginfokan mengenai perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya 3 tahun terakhir pada dokumen laporan kinerja.
- f. Telah menginfokan mengenai efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku pada dokumen laporan kinerja.
- g. Telah menyusun secara formal Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya.
- h. Telah menindaklanjuti Sebagian besar rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya.
- i. Telah menambahkan sasaran dan indikator kegiatan pada pada Program Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pada Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pelaksanaan Barang dan Jasa di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, Indikator kegiatan: Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri pada belanja Barang dan Jasa di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, dengan Formula: realisasi PDN (Rp)/ RUP PDN (Rp) x 100%, sebagai salah satu praktik baik pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Palangka Raya.

Koordinasi	WPJ	Dalnis	KT	AT
Paraf				

- j. Belum mempublikasikan secara berkala (triwulan) dokumen laporan kinerja ke dalam Website Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya dan Aplikasi ESR.
- k. Belum mempublikasikan secara berkala (triwulan) dokumen evaluasi kinerja internal tahun 2023 ke dalam Website Badan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya dan Aplikasi ESR.
- l. Belum sepenuhnya melakukan pengukuran kinerja dan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja, secara berkala dan berjenjang pada setiap level bagian.
- m. Belum menyusun infrastruktur pemberian reward and punishment secara memadai serta pengimplementasiannya.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah Kota Palangka Raya memperoleh nilai **71,00** atau predikat **BB (Sangat Baik)**. Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja yang merupakan pertanggungjawaban pada Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah Kota Palangka Raya sudah baik, namun masih diperlukan adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:





	Komponen/Kriteria Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2022	2023
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,25	23,50
b.	Pengukuran Kinerja	30	16,50	19,25
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,75	10,13
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	13,00	18,13
	Nilai Hasil Evaluasi	100	63,50	71,00
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah Kota Palangka Raya tahun 2023 sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah Kota Palangka Raya telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang dimulai dari Penyusunan *Cascading* sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 dan telah diterjemahkan dalam dokumen perencanaan sehingga dokumen renstra, renja sampai ke perjanjian kinerja telah selaras dan memiliki rumusan perencanaan kinerja yang berkualitas baik dan berorientasi pada hasil. Seluruh rumusan sasaran strategis dan inidktaor kinerja pada dokumen perencanaan Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah Kota Palangka Raya telah berorientasi hasil (outcome) dan memenuhi kriteria yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*).

Namun demikian terdapat hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan kinerja Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah Kota Palangka Raya yaitu Dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasikan pada *website* Badan Pengelola dan Keuangan Aset

Koordinasi	WPJ	Dalnis	KT	AT
Paraf				

Daerah Kota Palangka Raya, aplikasi SISAIP dan aplikasi ESR Menpan secara memadai;

2) Pengukuran Kinerja

Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah Kota Palangka Raya telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala melalui teknologi informasi (Aplikasi *E-monev*).

Namun pelaksanaannya secara substansi pada Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah Kota Palangka Raya masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut:

- Dokumentasi pengukuran kinerja yang dibuat secara berjenjang dan berkala belum memuat hambatan/kendala serta solusi/Langkah-langkah yang akan dilakukan dan rekomendasi mencapai target triwulanan sehingga belum menunjukkan bahwa pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja.
- Belum menyusun infrastruktur pemberian reward and punishment secara memadai serta pengimplementasiannya.
- Agar menambahkan profil indikator kinerja pada pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja untuk memperjelas definisi operasional atas kinerja.

3) Pelaporan Kinerja

Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah Kota Palangka Raya telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.





Data kinerja Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah Kota Palangka Raya telah disajikan dalam Aplikasi *E-monev* Pemerintah Kota Palangka Raya.

Namun masih terdapat beberapa catatan dalam pelaporan kinerja pada Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah Kota Palangka Raya antara lain:

- Dokumen laporan kinerja secara berkala dan berjenjang belum disusun secara memadai serta belum dievaluasi dan di reviu secara memadai pada setiap bagian unit kerja.
- Laporan kinerja secara berkala yang telah disusun belum sepenuhnya didokumentasikan dan belum di-upload pada website Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah Kota Palangka Raya, Aplikasi *SiSAIP* dan aplikasi *ESR* Menpan.
- Dokumen laporan kinerja telah dipublikasikan pada web resmi *ESR* Menpan namun disampaikan tidak tepat waktu yaitu paling lambat 29 Februari 2024.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya telah disusun, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah menggunakan teknologi informasi melalui aplikasi *E-monev*. Sebagian besar hasil rekomendasi telah ditindaklanjuti sehingga

Koordinasi	WPJ	Dalnis	KT	AT
Paraf				

telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya.

Namun masih terdapat beberapa catatan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah Kota Palangka Raya antara lain:

- Evaluasi kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan secara berjenjang dan berkala pada setiap bagian unit kerja.
- Evaluasi kinerja internal belum dilaksanakan sesuai standar belum terdapat bukti dukung yang memadai bahwa evaluasi dilaksanakan oleh SDM dan dengan pendalaman yang memadai.
- Masih terdapat 5 hasil rekomendasi dari 15 rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas internal tahun 2023





4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan sistem manajemen kinerja, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah Kota Palangka Raya untuk memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan rencana aksi secara berkala pada setiap perjanjian kinerja yang memuat faktor yang menghambat pencapaian kinerja, Langkah dan solusi yang telah dilakukan dan rekomendasi perbaikan pada triwulan selanjutnya.
- Menyusun infrastruktur pemberian reward and punishment secara memadai serta pengimplementasiannya.
- Menambahkan profil indikator kinerja pada pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja untuk memperjelas definisi operasional atas kinerja.
- Menyusun Laporan Kinerja secara berkala dengan melaporkan kinerja seluruh indikator kinerja dan dilakukan reviu dan evaluasi secara berjenjang.
- Melakukan publikasi dan mengupdate dokumen perencanaan dan dokumen laporan kinerja secara berkala pada website Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya, Aplikasi SiSAKIP dan aplikasi ESR Menpan.
- Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh bagian unit kerja yang dilaksanakan secara berjenjang dan sesuai standar.
- Menindaklanjuti secara optimal seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas internal.

5. Apresiasi

Kami menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terimakasih atas koordinasi dan kerja sama serta kerja keras dalam implementasi SAKIP oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya. Selanjutnya untuk beberapa rekomendasi perbaikan yang telah disampaikan agar dapat segera dilakukan perbaikan.

Koordinasi	WPJ	Dalnis	KT	AT
Paraf				

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah Kota Palangka Raya. Kami mengharapkan agar Kepala Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah Kota Palangka Raya beserta jajaran memberikan perhatian yang besar terhadap upaya peningkatan kinerja melalui perbaikan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkup Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah Kota Palangka Raya.



INSPEKTUR
KOTA PALANGKA RAYA,


Ir. HAMBALI
Pembina Utama Muda
NIP. 19670602 199303 1 017

Tembusan kepada Yth. :

1. Pj Wali Kota Palangka Raya di Palangka Raya (Sebagai Laporan);
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya (Sebagai Laporan)